

**Pengaruh Dukungan Politik, Pendapatan Daerah, Periode Jabatan
Dan Belanja Daerah Terhadap *Budget Forecast Errors*
Pemerintah Daerah Di Sumatera**

Yuliana Maesa Putri

Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi

Universitas Negeri Padang

Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus UNP Air Tawar Padang

Email: yulianamaesaputri@gmail.com

Abstract

This study aims to examine the effect of political support, regional income, period of office and local spending on budget forecast errors. This research period starts from 2011 until 2015. This research uses variable of political support, regional income, period of office and regional expenditure as independent variable and budget forecast errors as dependent variable. Sampling is done by purposive sampling. The sample that can be used in this study are 32 regencies and cities in Sumatera. This study uses statistical analysis tools spss 21. The results of this study indicate that local revenue and regional expenditures affect the budget forecast errors of local governments in Sumatera, while the political support, the period of office of the regional head has no effect on the budget forecast Errors local governments in Sumatera.

Keywords : Budget Forecast Errors, Political Support, Local Income, Period of Office, Regional Expenditure.

PENDAHULUAN

Otonomi daerah berlaku di Indonesia berdasarkan UU 22/1999 (direvisi menjadi UU 32/2004) tentang pemerintah daerah memisahkan dengan tegas antara fungsi pemerintah daerah (eksekutif dengan fungsi DPRD (legislative). Berdasarkan perbedaan tersebut, menunjukkan bahwa antara legislative dan eksekutif terjadi hubungan keagenan (Syahida, 2016). Pada pemerintahan, peraturan perundang-undangan secara implisit merupakan bentuk kontrak antara eksekutif, legislative dan public serta untuk mewujudkan otonomi, desentralisasi serta partisipasi rakyat dalam perencanaan pembangunan nasional Indonesia, pemerintah telah melakukan langkah penyempurnaan terhadap kebijaksanaan pembangunan. Setiap daerah diharapkan tidak hanya berorientasi pada daerahnya saja agar dapat mewujudkan otonomi daerah yang semakin meluas.

Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang didalamnya menuat antara lain daerah otonomi mempunyai 3 (tiga) sumber pendapatan, yaitu PAD, dana perimbangan dan pendapatan lain-lain yang sah.

Sutaryo dan Tiara (2015) menyebutkan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan pemerintah daerah dalam masa satu tahun anggaran dan dibahas serta disetujui bersama pemerintah daerah dan DPRD. APBD mempunyai posisi yang menentukan dalam keuangan pemerintah yang penyusunannya harus dilakukan dengan seakurat dan setepat mungkin. Tetapi dalam berbagai hal tetap timbul masalah sehingga terjadinya kesalahan dalam penyusunan tersebut dan itu menunjukkan bahwa penyusunan APBD tidak mudah dilaksanakan dan menyebabkan terlambatnya dalam penyusunan APBD

tersebut. Keterlambatan ini membuktikan bahwa kurangnya *skill* pemerintah daerah dalam peramalan anggaran tersebut. Peramalan atau proyeksi anggaran harus dilakukan dengan setepat dan seakurat mungkin, karena hal itu akan berpengaruh terhadap keuangan daerah (Wagner dan Garet, 2004). Penelitian yang dilakukan Brogan (2012) menghasilkan tingkat *budget forecast errors* juga dipengaruhi oleh adanya pengaruh politik. Kusnandar dalam Sutaryo dan Tiara (2012) memperlihatkan factor yang berpengaruh pada peramalan keuangan daerah antara lain adalah PAD yang nantinya akan berpengaruh terhadap belanja daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Menurut Adzani dan Martani (2014), proses politik di Indonesia dicerminkan pada proses pemilihan umum. Pemilihan umum kepala daerah sebagai arena kompetisi antara kandidat calon kepala daerah yang dicalonkan oleh koalisi partai politik, fungsi partai politik sebagai alat untuk memobilisasi dukungan relative kecil sehingga kandidat ingin memenangkan pilkada harus sebanyak mungkin memanfaatkan jaringan organisasi-organisasi politik untuk memperoleh dukungan politik karena kompetisi lebih terlihat terhadap pengaruh kandidat. Dugaan potensi penyimpangan APBD akan meningkat ketika para kepala daerah berakhir masa jabatannya pada periode pertama lalu maju kembali sebagai calon *incumbent* berada pada masa titik krusial, mengingat mereka harus berkompetisi lagi agar tetap menjabat, sebagai calon kepala daerah pada pemilihan umum kepala daerah, *incumbent* cenderung untuk melakukan politisi anggaran.

Bukti adanya kesalahan proyeksi anggaran terlihat pada berita yang disampaikan oleh Tribunnews (2014), dimana pada pemerintahan Kota Banda Aceh

kesalahan dalam perhitungan penganggaran menyebabkan penghapusan 300 proyek yang seharusnya dilakukan pada anggaran yang telah ditetapkan. Kesalahan dalam peramalan anggaran ini bukan pada tahun 2015 saja terjadi, tetapi sudah beberapa kali dan menurut ahli ekonomi masalah ini terjadi terkait dengan keseriusan dalam mengelola anggaran yang telah disediakan, kurangnya kinerja dari anggota pemerintahan Aceh dan kebutuhan akan pemimpin yang visioner bukan hanya untuk coba-coba dalam pembangunan daerahnya terutama dalam menggunakan anggaran yang merupakan uang rakyat. Metronews.com (2013), juga memberitakan bahwa di Palembang terjadi kesalahan dalam penganggaran terutama dalam anggaran dana hibah yang terjadi pada tahun 2012. Kesalahan berawal dari sistem penganggaran yang salah serta perilaku *opportunistic* legislatif didalamnya yang mengakibatkan kerugian negara hingga mencapai Rp. 21 miliar.

Dari pemaparan yang telah diuraikan diatas maka peneliti mencoba mnegangkat topic penelitian dengan judul “ **Pengaruh Dukungan Politik, Pendapatan Daerah, Periode Jabatan dan Belanja Daerah terhadap Budget Forecast Errors Pemerintah Daerah di Sumatera**”.

Dengan adanya penelitian ini dapat mengetahui apakah factor-faktor yang menjadi variabel independen ini berpengaruh terhadap variabel dependen yaitu *budget forecast errors*, sehingga dapat menginformasikan dan dapat menghindari terjadinya hal serupa pada tahun-tahun anggaran berikutnya pada pemerintahan daerah yang ada di Sumatera,

Teori Agensi

Teori keagenan menjelaskan hubungan principal dan agen ini salah satunya berakar pada teori ekonomi , teori keputusan,

sosiologi, dan teori organisasi. Teori principal dan agen menganalisis susunan kontraktual antara dua atau lebih individu, kelompok atau organisasi. Salah satu pihak (*principal*) membuat suatu kontrak, baik secara implisit ataupun eksplisit, dengan pihak lain (*agent*) dengan harapan bahwa agen akan bertindak/melakukan pekerjaan seperti yang diinginkan oleh principal (dalam hal ini terjadi pendelegasian wewenang). Menurut Lane (2003a) teori keagenan dapat diterapkan dalam organisasi public. Ia mengatakan bahwa negara demokrasi modern didasarkan pada serangkaian hubungan principal-agen (Lane, 2000:12-13)

Teori agensi dalam sector public adalah hubungan keagenan antara rakyat dengan pemerintah daerah yang berupa hubungan yang terjadi karena adanya kontrak atau persetujuan yang ditetapkan oleh rakyat sebagai *principal* dan menggunakan pemerintah sebagai *agent* untuk menyiapkan jasa (Jensen dan Meckling, 1976). Pemerintah sebagai principal menunjukkan tanggung jawabnya dengan mengelola sumber daya yang terlihat dalam laporan keuangan pemerintah daerah yang diperuntukkan kepada rakyat sebagai agen, sehingga rakyat dapat berperan serta memantau atau mengawasi kinerja aparat pemda dalam melakukan tanggung jawabnya.

Menurut Colombatto (2001), adanya *discretionary power di salah satu pihak akan menimbulkan pelanggaran* atas kontrak keagenan, seperti terjadinya perilaku *rent-seeking* dan korupsi. Dalam penyusunan anggaran, usulan yang diajukan oleh eksekutif memiliki muatan mengutamakan kepentingan eksekutif (Smith dan Bertozzi, 1998). Lupia dan McCubbins (2000) mengingatkan bahwa pendelegasian memiliki konsekuensi tidak terkontrolnya

keputusan agen oleh principal. Mereka menyebut abdikasi, yakni adanya kondisi dimana agen tidak dipagari dengan aturan bagaimana tindakan mereka berpengaruh terhadap kepentingan prinsipal.

Sutaryo & Tiara, (2015) kesenjangan informasi ini dapat mengakibatkan masalah yang disebabkan oleh kesulitan prinsipal untuk memantau dan melakukan pengawasan terhadap tindakan agen. Pengetahuan yang diterima oleh prinsipal seringkali tidak lengkap sehingga tidak dapat memperlihatkan kinerja agen yang sebagaimana mestinya dalam mengelola kekayaan *prinsipal*.

Grabbing Hand Theory

Menurut Shleiver dan Vishny (1997), Tokoh politik yaitu politisi dan birokrat mengambil keuntungan dari posisi mereka di pemerintahan untuk mengambil manfaat pribadi. Pemerintah digambarkan sebagai *grabbing hand* yang dikendalikan oleh politisi yang tidak memaksimalkan kesejahteraan sosial dan lebih memilih untuk mengejar tujuan mereka sendiri. Selain itu menurut Maciandaro dan Quintyn (2008), pembuat kebijakan juga merupakan seorang politisi yang dipilih sebelumnya oleh masyarakat, untuk itu mereka tentunya harus menyenangkan atau mengambil simpati dari masyarakat atau para pemilih agar memilih mereka pada pemilu. Pemerintah "*grabbing hand*" cenderung memberi keuntungan hanya kepada kelompok kepentingan kecil tapi terorganisir dengan baik. Pembuat kebijakan *grabbing hand* ditangkap oleh kelompok minat tertentu, yang mendapat dukungan dianggap penting untuk pemilihan ulang. Pada penelitian ini kita dapat dilihat bahwa melalui pemilu pembuat kebijakan bisa terpengaruh dan kelompok kepentingan dapat mempengaruhi melalui kontribusi eksplisit atau implisit, yang cukup penting

untuk meningkatkan peluang memenangkan pemilihan.

Budget Forecast Errors

Peramalan (*forecasting*) adalah seni dan ilmu untuk memperkirakan kejadian dimasa depan, dimana hal ini dilakukan dengan melibatkan pengambilan data di masa lalu dan menempatkannya ke masa yang akan datang dengan suatu bentuk model matematis atau bisa juga merupakan prediksi intuisi yang bersifat subjektif atau bisa juga dengan menggunakan kombinasi medel matematika yang disesuaikan dengan pertimbangan yang baik. Peramalan adalah tahap awal, dan hasil ramalan merupakan basis bagi seluruh tahapan pada perencanaan anggaran.

Tujuan dibuatnya peramalan adalah untuk meminimalisir pengaruh ketidakpastian terhadap suatu masalah, sehingga nantinya tidak terjadi kesalahan dalam peramalan (*forecast errors*). Peramalan adalah kegiatan yang memperkirakan apa yang akan terjadi pada masa yang akan datang. Sedangkan ramalan adalah suatu situasi atau kondisi yang diperkirakan akan terjadi pada masa yang akan datang. Ramalan dapat didasarkan atas bermacam-macam cara yang kita kenal dengan metode peramalan.

Metode peramalan adalah cara untuk memperkirakan secara kuantitatif apa yang akan terjadi pada masa yang akan datang berdasarkan data yang relevan pada masa lalu, dan karena itu maka metode peramalan ini dipergunakan dalam peramalan yang objektif. Metode peramalan ini sangat berguna, karena akan membantu dalam mengadakan pendekatan analisa terhadap tingkah laku atau pola dari data yang lalu, sehingga dapat memberikan cara pemikiran, pekerjaan dan pemecahan yang sistematis dan pragmatis, serta memberikan tingkat

keyakinan yang lebih besar atas ketepatan hasil ramalan yang disusun.

Dukungan Partai Politik

Latar belakang politik Latar belakang partai politik (*political background*) merupakan latar belakan dari seseorang yang beraktifitas di dunia politik. Berdasarkan undang-undang nomor 1 tahun 2015 pasal 1, Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk memilih Gubernur, Bupati, dan Walikota secara langsung dan demokratis yang diusulkan oleh partai politik, gabungan partai politik, atau perseorangan yang mendaftar atau didaftarkan di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota. Menurut Sachsenroder (1998) dukungan dari partai politik atas dukungan kepada kepala daerah menimbulkan kosekuensi kesepakatan antara calon kepala daerah dan partai politik dalam pembiayaan kampanye yang terkadang mengabaikan ketentuan yang berlaku.

Rochmatullah dan Probohudono (2014). menyatakan bahwa koneksi politik memiliki dampak yang multidimensional dalam pengaturan pemerintahan di suatu negara. Hal ini dapat terjadi dalam perumusan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD). Menurut Garamfalvi (1997) dan Mardiasmo (2009) penganggaran dalam sektor publik merupakan tahapan yang cukup rumit dan mengandung nuansa politik yang cukup tinggi. Pendapat tersebut sejalan dengan penelitian Nofsinger (2004) yang memperoleh bukti bahwa tekanan politik mempengaruhi anggaran. Hal ini dapat dilihat dari mekanisme pengambilan keputusan dalam perencanaan APBN yang menyertakan mekanisme lobi, negosiasi, adu argumen dan konflik kepentingan yang harus

diakomodasi dalam produk politik yang dihasilkan (Ritonga dan Alam 2010).

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah, struktur Anggaran Pendoatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan satu kesatuan yang terdiri atas tiga bagian, yaitu pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah. “Pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 ayat (1) dikelompokkan atas Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Belanja menurut kelompok belanja terdiri dari belanja tidak langsung dan belanja langsung. belanja terdiri dari belanja tidak langsung dan belanja langsung. Pembiayaan daerah terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Penerimaan pembiayaan mencakup sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya (SILPA), pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman, dan penerimaan piutang daerah. Pengeluaran pembiayaan mencakup pembentukan dana cadangan, penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah, pembayaran pokok utang dan pemberian pinjaman daerah.”

Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah merupakan penerimaan yang sangat penting bagi pemerintah daerah dalam menunjang pembangunan daerah guna membiayai proyek-proyek dan kegiatan-kegiatan daerah. berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 105 tahun 2000 tentang pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah, yang dikutip dari buku “Himpunan Peraturan Pelaksanaan UU

Otonomi Daerah” yang dimaksud dengan pendapatan daerah adalah semua penerimaan kas daerah dalam periode tahun anggaran tertentu yang menjadi hak daerah. sedangkan menurut Abdul Halim (2002) menyatakan bahwa pendapatan daerah adalah semua penerimaan daerah dalam bentuk peningkatan aktiva atau penurunan utang dalam berbagai sumber dalam periode tahun anggaran bersangkutan. Berdasarkan dari berbagai pengertian pendapatan daerah diatas diambil kesimpulan bahwa pendapatan daerah merupakan penerimaan yang diperoleh pemerintah daerah yang dapat ditinjau dari tingkat kenaikan aktiva ataupun penurunan utang yang dapat digunakan oleh pemerintah daerah dalam membangun dan mengembangkan suatu daerah dalam periode tahun anggaran bersangkutan.

Sumber-sumber pendapatan daerah sebagai penerimaan kas daerah yang merupakan sarana pemerintah daerah untuk melaksanakan tujuan, mengoptimalkan kemakmuran rakyat yaitu menumbuh kembangkan masyarakat disegala bidang kehidupan. Pendapatan daerah dalam APBD dikelompokkan menjadi Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana perimbangan, dan pendapatan lain-lainnya yang sah.

Karakteristik Kepala Daerah

Karakteristik maksudnya adalah fitur pembeda dari seseorang atau sesuatu. Karakteristik didefinisikan sebagai kualitas atau sifat. Pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang dipilih oleh DPRD berlaku sebelum tahun 2005 namun, dengan dikeluarkannya UU nomor 32 tahun 2004 pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah atau Pilkada dipilih secara langsung oleh rakyat dan itu dimulai pada Bulan Juni tahun 2005. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 pasal 27 ayat 1 (i) mengatakan bahwa kepala daerah dan wakil kepala

daerah wajib untuk melaksanakan dan bertanggung jawab terhadap pengelolaan keuangan daerah, sehingga membutuhkan kompetensi yang tinggi dan memadai dari kepala daerah untuk melaksanakan hal tersebut.

Murni dan Winarna (2007) dalam Sutaryo dan Tiara (2016) meneliti karakteristik kepala daerah dengan cara membagi antara latar belakang individu dan latar belakang politik. Latar belakang individu meliputi jenis kelamin, usia, tingkat pendidikan, bidang pendidikan dan latar belakang pekerjaan, sedangkan latar belakang politik meliputi pengalaman politik, pengalaman di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, latar belakang partai politik, latar belakang ideologi partai politik dan asal komisi.

Karakteristik Pemerintah Daerah

Karakteristik pemerintah daerah adalah ciri-ciri tertentu pada pemerintah daerah yang menandakan daerah tersebut dan dapat dibedakan dengan daerah yang lain. Menurut Suharjanto dan Yulianingtyas (2011), Karakteristik daerah hendaknya dapat menerangkan kepatuhan pengungkapan wajib dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dan diharapkan nantinya karakteristik pemerintah daerah dapat dijadikan prediktor kepatuhan pengungkapan wajib. Sutaryo dan Winarna (2013) meneliti dengan menggunakan ukuran pemerintah daerah sebagai karakteristik pemerintah daerah Indonesia. Suhardjanto dan Yulianingtyas (2011) dalam Sutaryo dan Tiara (2015) dimana melakukan penelitian yang menggunakan variabel ukuran pemerintah daerah, jumlah SKPD dan status daerah sebagai proksi dari karakteristik pemerintah daerah.

Belanja Daerah

Belanja daerah merupakan biaya atau penurunan dalam manfaat ekonomi selama periode akuntansi dalam bentuk arus keluar, atau depleksi asset, atau terjadinya hutang yang mengakibatkan berkurangnya ekuitas dana, selain yang berkaitan dengan distribusi kepada para peserta ekuitas dana. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 58 tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah, "Belanja daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih". Secara umum belanja daerah dalam APBD dikelompokkan yaitu, belanja administrasi umum, belanja operasi, belanja modal, belanja transfer, belanja tak terduga. Blanchard dan Leigh (2013) membuktikan bahwa pendapatan dan biaya bisa mempengaruhi kesalahan proyeksi dalam hal perbedaan realisasi dengan anggaran.

Hubungan Antara Variabel

Dukungan Politik dan *Budget Forecast Errors*

Gourevich (2003) mengatakan bahwa tata kelola keuangan pemerintah melalui berbagai macam cara, baik itu sekelompok kepentingan (partai politik) maupun hubungan antar masyarakat serta hubungan antara legislative dan eksekutif sehingga dapat mempengaruhi tata kelola pemerintahan yang baik dan ini merupakan akibat dari adanya pengaruh proses politik. Menurut Sutaryo dan Tiara (2015) Semakin banyak kepala daerah tersebut memiliki dukungan partai terutama yang memiliki kedudukan di DPRD maka akan semakin besar kemungkinan terjadi *budget forecast errors* dikarenakan usulan apapun mengenai anggaran dari kepala daerah akan selalu disetujui karena di dalamnya terdapat mekanisme politik yang lebih memikirkan kepentingan kelompok partai politik.

Dukungan politik yang diperoleh memberikan manfaat strategis bagi partai politik, mereka memberikan alternatif yang berbeda kepada para pemilih dengan mengambil pandangan yang bersaing mengenai proyeksi tingkat pendanaan dan perkiraan pendapatan sehingga menandakan kesalahan perkiraan anggaran terutama dalam proyeksi anggaran pendapatan / belanja (Blanchard dan Leigh, 2013).

Pendapatan Daerah dan *Budget Forecast Errors*

Keputusan anggaran sangat tergantung pada perubahan pendapatan. Peramalan pendapatan merupakan sumber penting dari ketidakpastian anggaran yang dihadapi oleh para pembuat kebijakan. Pendapatan aktual bisa saja melebihi atau kurang dari yang direncanakan, sehingga ketika terjadi *mismatches* antara pendapatan aktual dengan yang diprediksi, maka pemerintah daerah harus melakukan *reopen* dan *rebalance* atas anggarannya (Cornia, et al., 2004 dalam Abdullah & Nazry, 2015). Varian anggaran dapat diketahui besarnya setelah anggaran terealisasi. Selisih antara anggaran pendapatan dan realisasi pendapatan ini menunjukkan ketidak-akuratan dalam penetapan target anggaran pada proses penyusunan anggaran yang menunjukkan bahwa adanya kesalahan dalam proyeksi anggaran.

Periode Jabatan dan *Budget Forecast Errors*

Aidt dkk (2011) dalam Veiga dan Boukari (2016) menyelidiki secara teoritis dan empiris interaksi antara Insentif untuk menghasilkan siklus anggaran politik dan kompetisi pemilihan. Memperluas Model Rogoff, para penulis ini menunjukkan bahwa ketika pemilihan umum yang dekat diharapkan, Insentif incumbent untuk memanipulasi kebijakan fiskal untuk tujuan

pemilihan meningkat, sehingga meningkatkan ukuran siklus anggaran politik (Rogoff, 1990 dalam Veiga & Boukari, 2016). Dalam konteks peramalan anggaran, fenomena ini muncul melalui bias anggaran. Bias proyeksi bisa membantu partai incumbent dalam perjuangannya untuk terpilih kembali (Boschoff & Gohout, 2010 dalam Veiga & Boukari, 2016).

Penelitian yang dilakukan oleh Garamfalvi (1997) menemukan bukti empiris yang kuat bahwa pengeluaran Pola pegawai pemerintah, Yang pada gilirannya memilih pemerintah incumbent, memiliki dampak lebih besar terhadap pertumbuhan pendapatan di masa depan daripada preferensi masyarakat terhadap pendapatan dan pengeluaran, hal ini menyebabkan pembuat kebijakan menanyakan keadaan apa, terlepas dari prakiraan, menyebabkan proyeksi menjadi salah. (Brogan, 2012).

Belanja Daerah dan *Budget Forecast Errors*

Asas penganggaran belanja adalah asas maksimal, yakni menetapkan alokasi belanja sebagai batas maksimal sumberdaya yang boleh digunakan oleh unit kerja/pemerintah daerah. Varian belanja yang besar mencerminkan ketidakakuratan dalam menentukan besaran anggaran. Pada akhirnya, gabungan dari usulan anggaran SKPD akan membentuk anggaran pemerintah daerah. Oleh karena itu, akumulasi senjangan dan varian anggaran SKPD, yang tersembunyi dalam RKA-SKPD, akan menentukan berapa besar sisa anggaran (SILPA) pada akhir tahun. Realisasi anggaran khususnya dalam belanja daerah pada tahun anggaran pasti lebih besar jika dibandingkan dengan proyeksi atau ramalan sebelumnya yang menandakan bahwa terjadi kesalahan (Blanchard dan Leigh, 2013).

Hipotesis

Berdasarkan penjabaran pada latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan, manfaat penelitian, kajian teori, penelitian terdahulu yang menjadi acuan serta kerangka konseptual, maka dapat dirumuskan hipotesis dalam penelitian ini sebagai berikut :

H1 : Dukungan politik berpengaruh positif terhadap *budget forecast errors* pemerintah daerah.

H2 : Pendapatan daerah berpengaruh positif terhadap *budget forecast errors* pemerintah daerah.

H3 : Periode jabatan kepala daerah berpengaruh positif terhadap *budget forecast errors* pemerintah daerah.

H4 : Belanja daerah berpengaruh positif terhadap *budget forecast errors* pemerintah daerah.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian kausatif. Penelitian ini berusaha menjelaskan pengaruh Dukungan Politik (X_1), Pendapatan Daerah (X_2), Periode Jabatan (X_3), dan Belanja Daerah (X_4) sebagai variabel independen terhadap *Budget Forecast Errors* (Y) sebagai variabel dependen. Sampel yang digunakan dipilih berdasarkan *purposive sampling* yaitu pengambilan sampel didasarkan pada kriteria tertentu. Kriteria tersebut meliputi : (1) Pemerintah kabupaten/kota di Sumatera tahun 2015. (2) Pemerintah daerah yang melaksanakan pemilukada tahun 2015. (3) Pemerintah yang mempunyai website serta menyediakan data pengangguran dan PDRB yang dapat diakses. (4) Pemerintah daerah yang menyajikan data untuk pengukuran variabel.

Berdasarkan kriteria tersebut, maka diperoleh sampel sebanyak 32

kabupaten/kota di Sumatera. Jenis data pada penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh secara tidak langsung dari lembaga resmi yang telah ditetapkan. Teknik pengumpulan data adalah dokumentasi dengan melihat laporan keuangan pemerintah daerah dan dari data Kemenkeu. Teknik analisis data yaitu analisis deskriptif, uji asumsi klasik, uji hipotesis dengan analisis regresi berganda sebagai berikut :

Persamaan I :

$$(\text{STATE LEVEL REVENUE})_K = \beta_0 + \beta_1 \text{UNEMPLOYMENT}_{1I} + \beta_2 \text{LAGGED GSP} + \beta_3 \text{LAGGED REVENUES} + \beta_4 \text{LAGGED EXPENDITURES} + \epsilon_i$$

Persamaan II

$$(\text{STATE LEVEL EXPENDITURES})_K = \beta_0 + \beta_1 \text{UNEMPLOYMENT}_{1I} + \beta_2 \text{LAGGED GSP} + \beta_3 \text{LAGGED REVENUES} + \beta_4 \text{LAGGED EXPENDITURES} + \epsilon_i$$

BFE = Standar Errors Persamaan 1 + Standar Errors Persamaan 2 / 2

Pengujian Hipotesis :

$$\beta (\text{BFE}) = \beta_0 + \beta_1 (\text{PARPOL}) + \beta_2 (\text{REV}) + \beta_3 (\text{PERIODE}) + \beta_4 (\text{EXP})$$

Keterangan :

BFE	= Kesalahan peramalan Anggaran
PARPOL	= Jumlah dukungan Politik
REV	= Pendapatan daerah
PERIODE	= Periode jabatan kepala daerah
EXP	= Belanja daerah
β	= Koefisien Regresi
ϵ_i	= Standard Errors

Dan uji model dengan uji koefisien determinasi (R^2), uji F dan uji t.

HASIL PENELITIAN

Analisis Deskriptif

Dari 32 sampel, variabel independennya yaitu dukungan politik, pendapatan daerah, periode jabatan kepala daerah, dan belanja daerah dan variabel dependen *budget forecast errors*. Hasil statistic deskriptif pada tabel 1 menunjukkan bahwa penelitian ini menggunakan sampel 32 sampel. Rata-rata pemerintah daerah di Sumatera memiliki tingkat kesalahan proyeksi anggaran sebesar 597250,3953 dengan perolehan tingkat *budget forecast error* tertinggi pemerintah Kabupaten Bengkalis, sedangkan tingkat *Budget forecast errors* terendah diperoleh pemerintah daerah Kabupaten Bengkulu Selatan. Rata-rata dukungan partai politik yang diperoleh kepala daerah sebesar 65,6% yang diperoleh dari jumlah kursi legislative dibagi dengan jumlah kursi yang dimenangkan partai politik pendukung kepala daerah. realisasi rata-rata untuk pendapatan daerah pada tahun anggaran pemerintahan daerah di Sumatera adalah 1086936,406 (dalam jutaan rupiah). Dari total pemerintahan yang menjadi sampel terdapat 59% pemerintahan daerah dengan kepala daerah berstatus *incumbent* dan sisanya berstatus *non-incumbent*. Realisasi rata-rata untuk belanja daerah pada tahun anggaran sebesar 1130024,563(dalam jutaan rupiah). Liat tabel 1.

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas Data

Hasil uji normalitas dengan menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov. Dari uji tersebut menunjukkan bahwa data terdistribusi secara normal. Hal ini ditunjukkan dari hasil statistic Kolmogorov-Smimov yang menunjukkan nilai Z sebesar 0,634 dan *asym.sig (2-tailed)* sebesar 0,816. Liat tabel 2.

Uji Autokorelasi

Penelitian ini menggunakan alat uji *Durbin Watson* untuk melihat ada atau tidaknya masalah autokorelasi. Hasil uji autikorelasi menunjukkan tidak terjadi autokorelasi. Hal ini dapat dilihat dengan nilai *durbin Watson* sebesar 1,809. Liat tabel 3.

Uji Heteroskedastisitas

Heteroskedastisitas dapat dilihat dari nilai signifikan lebih dari 0,050 maka data tersebut tidak mengalami heteroskedastisitas. Tabel 8 menunjukkan dengan menggunakan *Glester Test*. Dari tabel tersebut terlihat bahwa nilai signifikan dari semua variabel lebih besar dari 0,050 sehingga data yang digunakan dalam penelitian ini tidak mengalami heteroskedastisitas. Liat tabel 4.

Uji Multikolinearitas

Untuk melakukan uji multikolinearitas dapat dilakukan dengan melihat nilai tolerance dan variance inflation factor (VIF). Suatu variabel dikatakan tidak terdapat multikolinearitas apabila nilai tolerance $> 0,10$ dan $VIF < 10$. Tabel 5 menunjukkan bahwa nilai tolerance seluruh variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini memiliki nilai lebih besar dari 10% dan nilai VIF lebih kecil dari 10. Berdasarkan nilai tolerance dan VIF tersebut menunjukkan bahwa tidak terjadinya multikolinearitas.

Uji Signifikan -F

Tabel 6 menunjukkan bahwa hasil *probability value* dari model regresi yang digunakan dalam penelitian lebih kecil dari tingkat signifikan penelitian $< 5\%$ yaitu sebesar 0,000. Hasil ini menunjukkan bahwa model regresi yang digunakan dalam penelitian ini layak (*fit*) untuk digunakan sebagai model regresi pengujian hipotesis.

Uji Signifikan –t

Hasil pengujian Tabel 7 menunjukkan bahwa variabel independen yaitu dukungan politik mempunyai nilai sebesar 0,186 yang lebih besar dari 0,050 sehingga variabel independen dukungan politik tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen *budget forecast errors* pada $\alpha = 5\%$ dengan demikian H1 ditolak. Untuk variabel independen pendapatan daerah dan belanja daerah mempunyai nilai signifikansi masing-masing 0,000 dan 0,000 dimana nilai tersebut lebih kecil dari 0,050, hal ini menunjukkan bahwa H2 dan H4 diterima. Sedangkan untuk periode jabatan kepala daerah nilai signifikansinya yaitu 0,156 dimana nilai ini lebih besar dari 0,050 sehingga H3 ditolak.

Uji Koefisien Determinasi (Adjusted R²)

Berdasarkan Tabel 8 menunjukkan bahwa nilai *Adjusted R²* 0,758 (75,8%) mengindikasikan bahwa variabel *forecast errors* mampu dijelaskan oleh variabel independen berupa dukungan politik, pendapatan daerah, periode jabatan kepala daerah, dan belanja daerah serta variabel control kompleksitas dan tipe pemerintahan sebesar 75,8% dan sisanya sebesar 24,2% dijelaskan oleh variabel lain diluar model penelitian ini.

PEMBAHASAN

Pengaruh Dukungan Politik terhadap *Budget Forecast Errors*

Berdasarkan tabel 7 menunjukkan bahwa hipotesis 1 ditolak. Artinya dukungan politik kepala daerah tidak berpengaruh terhadap *budget forecast errors* atau kesalahan proyeksi anggaran pemerintah daerah. Hasil ini tidak sama dengan hipotesis yang menyatakan bahwa semakin tinggi dukungan partai politik terhadap kepala daerah maka akan semakin tinggi tingkat kesalahan proyeksi anggaran pemerintah daerah.

Pengaruh Pendapatan Daerah terhadap *Budget Forecast Errors*

Berdasarkan hasil analisis statistik dalam penelitian ini, ditemukan bahwa hipotesis 2 dalam penelitian ini diterima dan dapat disimpulkan bahwa semakin besar penerimaan pendapatan suatu daerah maka semakin mandiri dan bebas daerah tersebut mengalokasikan pendapatan yang diterima untuk anggaran tahun berikutnya. Dari hasil uji *t-test* pendapatan daerah berpengaruh positif terhadap *budget forecast errors* atau kesalahan proyeksi anggaran pemerintah daerah. Hasil dari penelitian ini sesuai dengan penjelasan dalam pengembangan hipotesis bahwa semakin tinggi pendapatan daerah maka akan semakin tinggi *budget forecast errors* atau kesalahan proyeksi anggaran pemerintah daerah.

Hal ini sejalan dengan penelitian Darwanto dan Yustikasari (2012). membuktikan bahwa PAD berpengaruh positif terhadap alokasi belanja modal yang merupakan bagian dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD). Penelitian lain yang juga dilakukan oleh Aziz *et al* (2002), pendapatan daerah mempengaruhi anggaran belanja pemerintah daerah.

Pengaruh Periode Jabatan terhadap *Budget Forecast Errors*

Berdasarkan hasil penelitian hipotesis 3 ditolak. Artinya periode jabatan kepala daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap *budget forecast errors* pemerintah daerah di Sumatera. Hasil ini berbeda dengan hipotesis bahwa kepala daerah dengan periode jabatan *incumbent* akan lebih berpengaruh terhadap tingkat *budget forecast errors* pemerintah daerah di Sumatera dibandingkan dengan kepala daerah non *incumbent*. Ini disebabkan karena baik itu calon *incumbent* maupun non *incumbent* tidak berpengaruh terhadap kesalahan peramalan anggaran karena dorongan atau motivasi jabatan yang sama

sesuai dengan teori agensi yaitu jika informasi yang diperoleh prinsipal dari agen tidak lengkap dan penuh serta tidak menunjukkan kinerja agen yang sebagaimana mestinya dalam pengelolaan kekayaan rakyat sebagai prinsipal, maka dapat dimanfaatkan agen untuk kepentingan pribadi ataupun kelompok (Hartanto dan Probohudono, 2013).

Pengaruh Belanja Daerah terhadap Budget Forecast Errors

Hasil pengujian menunjukkan hipotesis 4 dalam penelitian ini diterima. Artinya bahwa realisasi belanja daerah yang berasal belanja tahun ini berpengaruh positif terhadap *budget forecast errors* atau kesalahan proyeksi anggaran pemerintah daerah. Hasil dari penelitian ini sesuai dengan penjelasan dalam pengembangan hipotesis bahwa realisasi belanja daerah berpengaruh signifikan positif terhadap *budget forecast errors* pemerintah daerah di Sumatera. Penelitian ini sejalan dengan penelitian Blanchard dan Leigh (2013) bahwa belanja daerah berpengaruh positif terhadap kesalahan proyeksi anggaran jika dalam perhitungan *budget forecast errors* dihubungkan atau dikaitkan dengan Pendapatan Daerah Regional Bruto (PDRB) sebagai salah satu komponennya.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan hasil penelitian adalah sebagai berikut: (1) Dukungan politik tidak berpengaruh signifikan terhadap *budget forecast errors*. (2) Pendapatan daerah berpengaruh signifikan positif terhadap *budget forecast errors*. (3) Periode jabatan kepala daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap *budget*

forecast errors. (4) Belanja daerah berpengaruh positif terhadap *budget forecast errors*

Keterbatasan Penelitian

Keterbatasan yang dapat mempengaruhi hasil penelitian yaitu penelitian ini menggunakan sampel pemerintah daerah kabupaten/kota yang hanya mengikuti pemilihan umum tahun 2015 dan dikhususkan kepada pemerintah daerah kabupaten/kota yang ada di Sumatera.

Saran dan Implikasi

Berdasarkan hasil penelitian dan keterbatasan, maka saran dan implikasi dapat dijelaskan sebagai berikut ini.

1. Pemerintah Daerah

Pemerintah daerah perlu meningkatkan transparansi dalam penetapan APBD sehingga anggota legislatif baik yang berasal dari partai pendukung kepala daerah maupun tidak berasal dari partai pendukung kepala daerah dapat lebih terawasi dan meminimalkan terjadinya *fraud* yang dapat berakibat buruk pada kinerja pemerintah daerah.

2. Peneliti selanjutnya

Dalam pencarian data bisa mencari langsung pada pemerintah daerah sehingga keakuratan dan kelengkapan data bisa di perbaiki. Penelitian selanjutnya diharapkan melengkapi sampel dalam pengukuran *budget forecast errors* sehingga dapat diperolehnya hasil yang lebih baik, serta menambahkan beberapa variabel lainnya yang mempengaruhi yang tidak diteliti dalam penelitian ini dan juga bisa menggunakan metode pengukuran lainnya yang tidak digunakan penulis pada penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Sukriy dan Asmara 2006. Perilaku Opportunistik Legislatif Dalam Penganggaran Daerah: Pendekatan *Principal-Agent Theory*. Proceeding Simposium Nasional Akuntansi XVI Manado.
- Abdullah, Sukriy dan Nazry. 2015. Analisis varian Anggaran Pemerintah Daerah. Penjelasan Empiris dari Perspektif Keagenan. *Jurnal Samudra Ekonomi dan Bisnis*, Vol. 6, No 2 Juli 2015. Diakses 15 Mei 2017.
- Adzani, Akhmad H. dan Martani, Dwi. 2014. Pengaruh Kesejahteraan Masyarakat, Faktor Politik Dan Ketidapatuhan Regulasi Terhadap Opini Audit Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Proceeding Simposium Nasional Akuntansi XVII Lombok.
- Bastian, Indra, 2006, *Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar*, Jakarta, Erlangga
- Blanchard O dan Leigh D. 2013. *Growth Forecast Errors and Fiscal Multipliers*. International Monetary Fund. IMF Working Paper.
- Brogan, Michael. 2012. *The Political of Budgeting: Evaluating the Effect of the Political Election Cycle on State-Level Budget Forecast Errors*. *Public Administration Quarterly* SPRING. Rider University. 85-93.
- Brück, Tilman dan Stephan, Andreas. 2006. *Do Eurozone Countries Cheat with their Budget Deficit Forecasts?*. *Kyklos*. Blackwell Publishing. 59(1), 3-15.
- Carolina, Okki dan Sutaryo. 2014. Ketepatan Waktu Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Daerah di Indonesia. Proceeding Simposium Nasional Akuntansi XVIII Lombok.
- Clynch, Edward, dan Thomas Lauth. 1991. *Governors, Legislators, and Budgets: Diversity across the American States*. New York: Greenwood Press.
- Colombatto, Enrico. 2001. *Discretionary Power, Rent-Seeking and Corruption*. University di Torino & ICER, working paper.
- Cornia, Gary C., Ray N., dan Andrea W. 2004. *Fiscal Planning, Budgeting, and Rebudgeting Using Revenue Semaphores*. *Public Administration Review*. 64 (2), 164-179.
- Darwanto dan Yustikasari Y. 2007. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dan Dana Alokasi Umum Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal. Proceeding Simposium Nasional Akuntansi X Makassar.
- Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Tahun 2012 Tentang Daftar Provinsi, Kabupaten, dan Kota Seluruh Indonesia.
- Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Republik Indonesia Tahun 2007 Tentang Data Keuangan Daerah.
- Fitriasari, Debby., dan Mustikarini, Widya A. 2012. Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah dan Temuan Audit BPK terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kabupate/Kota di Indonesia tahun Anggaran 2007. Proceeding Simposium Nasional Akuntansi XV Banjarmasin.
- Garamfalvi, L. 1997. *Corruption In The Public Expenditures Management Process*. Paper Presented At 8th International Anti-Corruption Confrence, Lima, Peru.
- Garret, T.A dan Wagner G.A. 2004. *State Government Finances: World War II to the Current Crises*. Federal

- Reserve Bank of St. Louis *Review*, March/April 2004, 86(2), pp.9-25.
- Ghozali. I. 2009. Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS. Semarang: Badan Penerbit UNDIP.
- Gourevitch., P., A., (2003) The politics of corporate governance regulation. *New York: Oxford University Press*, pp. 250.
- Hambrick, Donald C., dan Mason, Phyllis A. 1984. Upper Echelons: The Organization as a Reflection of Its Top Managers. *The Academy of Management Review*, Vol.9, Issue 2 (April), pp:193206.
- Halim, Abdul, *Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah*, penerbit Salemba Empat, Jakarta, 2002
- Hartanto, Rudy., dan Probohudono, Agung N. 2013. Desentralisasi Fiskal, Karakteristik Pemerintah Daerah dan Tingkat Korupsi Pemerintah Daerah pada Tahun 2008 dan 2010. *Proceeding Simposium Nasional Akuntansi XVI Manado*.
- Hayo, Bernd dan Florian Neumeier. 2013. *Political Leaders' Socioeconomic Background and Public Budget Deficits: Evidence from OECD Countries*. Philipps-University Marburg.
- Jensen, M. C., dan Meckling, W. H. (1976). *Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure*. *Journal of Financial Economics*, 3(4), 305-360.
- Kusnandar dan Siswantoro D. 2012. Pengaruh Dana Alokasi Umum, Pendapatan Asli Daerah, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Dan Luas Wilayah Terhadap Belanja Modal. *Proceeding Simposium Nasional Akuntansi XV Banjarmasin*.
- Lane, Jan-Erik. 2000. *The Public Sector- Concepts, Models, and Approaches*. London: SAGE Publications.
- _____. 2003a. *Management and Public Organization: The Principal-Agent Framework*. University of Geneva and National University of Singapore. Working paper.
- Mardiasmo. 2002. *Akuntansi Sektor Publik*. Penerbit Andi. Yogyakarta.
- Moe, T. M. 1984. *The New Economics of Organizations*. *American journal of Political Science* 28(5):739-777
- Munandar, M. 2000. *Budgeting: Perencanaan Kerja, Pengkoordinasian Kerja, Pengawasan Kerja*. Cetakan Ketigabelas. Yogyakarta: BPFE.
- Nafarin, M. 2004. *Penganggaran Perusahaan*. Salemba Empat: Jakarta.
- Nordiawan, D., Iswahyudi S.P., dan Maulidah R. 2009. *Akuntansi Pemerintahan*. Jakarta: Salemba Empat.
- Patrick, Patricia A. 2007. *The Determinants of Organizational Innovativeness: The Adoption of GASB 34 in Pennsylvania Local Government*. Ph.D. Dissertation. The Pennsylvania State University, United States– Pennsylvania.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri (Pmendagri) Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Daerah.
- _____, Dalam Negeri (Pmendagri) Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015.
- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota.

- _____, No. 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Ritonga, Irwan Taufiq dan Mansur Iskandar Alam. 2010. Apakah Incumbent Memanfaatkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk Mencalonkan Kembali Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada). Proceeding Simposium Nasional Akuntansi XIII Purwokerto.
- Rochmatullah dan Probohudono (2014) *Praktik Belanja Bantuan Sosial Pemerintah daerah di Indonesia*, SNA 17 Mataram.
- Sabeni, Arifin Imam Ghozali. 2008. *Pokok-Pokok Akuntansi Pemerintahan*. Yogyakarta:BPFE
- Sachsenroder, Wolfgang and ulrike E, Frings, eds., 1998. *Political party System and democratic Development in East and Southeast Asia*. Aldershot: Ashgate Publishing Limited
- Shleifer, A. dan R.W. Vishny. 1997. *A Survey of Corporate Governance*. Journal of Finance, Vol 52. No 2. June 737-783
- Sekaran, Uma. 2006. *Research Methods for Business*. Metodologi Penelitian untuk Bisnis. Penerbit Salemba.
- Suhardjanto, D., dan Yulianingtyas, Rena R. 2011. Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap Kepatuhan Pengungkapan Wajib Dalam Laporan Keuangan Pemeerintah Daerah (Studi Empiris pada Kabupaten/Kota di Indonesia). Jurnal Akuntansi dan Auditing, Vol. 8, No.1, pp:1-94.
- Sularno, Fitri Megawati. 2013.” Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal”. Skripsi. FE, Universitas Widyatama. Diakses 05 April 2017.
- Sutaryo, dan Winarna, Jaka. 2013. Karakteristik DPRD dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah: Dukungan Empiris dari Perspektif Teori Keagenan. Proceeding Simposium Nasional Akuntansi XVI Manado.
- Sutaryo, dan rahma, Tiara. 2015. “Pengaruh Faktor Keuangan dan Non Keuangan Terhadap Budget Forecast Errors Pemerintah Daerah Di Indonesia”. Proceeding Simposium Nasional Akuntansi XVIII Medan.
- Smith, Robert W. & Mark Bertozzi. 1998. *Principals and agents: An Explanatory Model of Public Budgeting*. Journal of Public Budgeting, Accounting and Financial Management (Fall): 325-353.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
- _____, Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.
- Veiga, Jose F. dan Boukari, Mamadaou. 2016. The Effect Of Politics on Budget Forecast Errors: Comparative Evidenve*. Public JEL Classification: D72, H72. Diakses 10 Mei 2017.
- Winarna, J dan Murni, S. 2007. Pengaruh Personal Background, Political Background, dan Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran Terhadap Peran DPRD Dalam Pengawasan Keuangan Daerah (Studi Kasus Di Karesidenan Surakarta Dan Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2006). Proceeding Simposium Nasional Akuntansi X Makasar.
- <http://www.bps.go.id> (diakses 01 Mei 2017).

<http://www.wikipedia.org> (diakses 01 Mei 2017). <http://www.wordpress.co.id> (diakses 20 Mei 2017)
<http://www.tribunnews.com> (diakses 03 Mei 2017). <http://www.metronews.com> (diakses 3 mei 2017)

Lampiran

Tabel 1. Hasil Uji Analisis Statistik

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Budget Forecast Errors	32	94438,55	4695883,22	597250,3953	890174,80735
Dukungan Partai Politik	32	,0093	,1071	,065675	,0256083
Pendapatan Daerah	32	572324,00	4259044,00	1086936,4063	712196,06333
Periode Jabatan Kepala Daerah	32	,00	1,00	,5938	,49899
Belanja Daerah	32	579515,00	4546130,00	1130024,5625	912596,69594
Valid N (listwise)	32				

Sumber : Data hasil olahan SPSS ver. 21 tahun 2017

Tabel 2. Uji Normalitas Data (Kolmogorov-Smirnov)

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstandardized Residual
N		32
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,0000000
	Std. Deviation	170585,966208
Most Extreme Differences	Absolute	,112
	Positive	,112
	Negative	-,057
Kolmogorov-Smirnov Z		,634
Asymp. Sig. (2-tailed)		,816

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Sumber : Data hasil olahan SPSS ver. 21 tahun 2017

Tabel 3. Uji Autokorelasi**Model Summary^b**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,781 ^a	,763	,758	182785,72032	1,809

a. Predictors: (Constant), Belanja Daerah, Periode Jabatan Kepala Daerah, Dukungan Partai Politik, Pendapatan Daerah

b. Dependent Variable: Budget Forecast Errors

Sumber : Data hasil olahan SPSS ver. 21 tahun 2017

Tabel 4. Uji Heteroskedastisitas**Coefficients^a**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	140792,818	57956,597		2,429	,022
Dukungan Partai Politik	-1354941,582	707457,663	-,317	-1,915	,066
1 Pendapatan Daerah	,121	,081	,786	1,489	,148
Periode Jabatan Kepala Daerah	52168,326	38525,127	,238	1,354	,187
Belanja Daerah	,075	,063	,629	1,199	,241

a. Dependent Variable: ABS_RES

Sumber : Data hasil olahan SPSS ver. 21 tahun 2017

Tabel 5. Uji Multikolinearitas**Coefficients^a**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta	Tolerance	VIF
(Constant)	-112343,395	105588,973			
Dukungan Partai Politik	-1750949,141	1288890,845	-,050	,989	1,011
1 Pendapatan Daerah	1,086	,148	,869	,097	3,276
Periode Jabatan Kepala Daerah	102457,455	70187,497	,057	,879	1,138
Belanja Daerah	1,720	,115	1,764	,099	3,137

Sumber : Data hasil olahan SPSS ver. 21 tahun 2017

Tabel 6. Uji Signifikan-F**ANOVA^a**

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	23662660088858,668	4	5915665022214,667	177,059	,000 ^b
	Residual	902086727883,580	27	33410619551,244		
	Total	24564746816742,246	31			

a. Dependent Variable: Budget Forecast Errors

b. Predictors: (Constant), Belanja Daerah, Periode Jabatan Kepala Daerah, Dukungan Partai Politik, Pendapatan Daerah

Sumber : Data hasil olahan SPSS ver. 21 tahun 2017

Tabel 7. Uji Signifikan-t**Coefficients^a**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	
	B	Std. Error	Beta			
1	(Constant)	-112343,395	105588,973		1,064	,297
	Dukungan Partai Politik	-1750949,141	1288890,845	-,050	-1,358	,186
	Pendapatan Daerah	1,086	,148	,869	7,349	,000
	Periode Jabatan Kepala Daerah	102457,455	70187,497	,057	1,460	,156
	Belanja Daerah	1,720	,115	1,764	15,021	,000

a. Dependent Variable: Budget Forecast Errors

Sumber : Data hasil olahan SPSS ver. 21 tahun 2017

Tabel 8. Uji Koefisien Determinasi (Adjusted R²)**Model Summary^b**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,781 ^a	,763	,758	182785,72032	1,809

a. Predictors: (Constant), Belanja Daerah, Periode Jabatan Kepala Daerah, Dukungan Partai Politik, Pendapatan Daerah

b. Dependent Variable: Budget Forecast Errors

Sumber : Data hasil olahan SPSS ver. 21 tahun 2017